

KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Muhammad Basri *¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
muhammadbasri@uinsu.ac.id

Indah Afrilia Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
indahafrilia2003@gmail.com

Elfina Yanti Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
elfinasiregar21@gmail.com

Mutiara Alya Hasyim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
mutiaraalya004@gmail.com

Fitrah Isna Muhabbah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
fitrahisnamuhabbah@gmail.com

Abstract

The Islamic kingdoms in Indonesia experienced many changes during the Dutch colonial period. At the beginning of colonialism, the Dutch implemented policies that supported the success of their expansion in Indonesian territory, including the expansion of government areas. The Islamic kingdoms in the archipelago can be said to be maritime kingdoms, because their centers of power were in port cities. Since the beginning of establishing Dutch rule in the Netherlands New Guinea (Papua), the Netherlands implemented policies that supported the success of its expansion in that region. One of the policies implemented by the Netherlands in the region was the expansion of government areas.

Keywords: *Islamic Kingdoms of the Archipelago, Colonial, Cultural.*

Abstrak

Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mengalami banyak perubahan pada masa penjajahan Belanda. Pada awal penjajahan, Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung keberhasilan ekspansinya di wilayah Indonesia, termasuk di antaranya pemekaran wilayah pemerintahan. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat dikatakan sebagai kerajaan Maritim, karena pusat kekuasaannya berada di kota-kota pelabuhan. Sejak awal penegakan kekuasaan Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (Papua), Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung keberhasilan ekspansinya di wilayah itu. Salah satu kebijakan yang diterapkan Belanda di wilayah itu adalah pemekaran wilayah pemerintahan.

Kata Kunci: Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, Kolonial, Kultural.

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Abad ke-17 hingga awal abad ke-20 adalah periode yang melihat perubahan besar dalam sejarah Indonesia, terutama terkait dengan kedatangan dan penjajahan Belanda. Pada masa ini, kepulauan yang kaya rempah-rempah dan budaya yang beragam menjadi sasaran ambisi Eropa, khususnya Belanda yang ingin menguasai perdagangan dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kedatangan Belanda membawa dampak yang mendalam pada kerajaan-kerajaan yang telah lama berdiri, termasuk kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, dan Aceh (Surbakti, 2015).

Sebelum Belanda tiba, Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan yang menghiasi pulau-pulau Nusantara, dengan kekayaan budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Di tengah keberagaman ini, muncul kerajaan-kerajaan Islam yang memberikan warna dan karakteristik khusus pada pemerintahan dan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, masa depan mereka berubah ketika Belanda memasuki panggung sejarah Indonesia dengan tujuan ekspansi dan pengendalian terhadap perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai.

Latar belakang ini menjadi titik awal bagi perjalanan panjang interaksi antara Belanda dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pengaruh politik, ekonomi, dan sosial Belanda menciptakan dinamika baru yang tidak hanya mengubah wajah geografis, tetapi juga menggoyahkan fondasi kekuasaan dan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah kepulauan ini (Yahya et al., 2023). Dalam konteks inilah, kita akan menjelajahi perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, dan Aceh ketika mereka berhadapan dengan gelombang penjajahan Belanda, dan bagaimana mereka merespons perubahan besar tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian studi literatur dan analisis dokumen sejarah yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda. Selain itu, dilakukan wawancara dengan ahli sejarah atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kerajaan-kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda. Metode penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang akurat dan mendalam tentang situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda serta perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam terhadap penjajahan Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Dan Kondisi Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia Ketika Belanda Datang

Saat Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-17, situasi dan kondisi kerajaan Islam di kepulauan tersebut mengalami perubahan signifikan. Sebelum kedatangan Belanda, Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan yang beragam budaya dan agama, termasuk kerajaan-kerajaan Islam. Kekuasaan dan organisasi politik di setiap kerajaan bervariasi, namun banyak di antaranya mengandalkan sistem pemerintahan yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam (Yahya et al., 2023). Kedatangan Belanda membawa dampak besar pada kerajaan-kerajaan Islam. Belanda berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendirikan monopoli ekonomi di wilayah tersebut. Mereka menggunakan politik pecah-belah dengan memanfaatkan perbedaan antar-suku

dan agama untuk memperlemah kesatuan lokal. Banyak kerajaan Islam dihadapkan pada tekanan politik, ekonomi, dan militer dari pihak Belanda(Khaeruddin, 2022).

Beberapa kerajaan Islam berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi Belanda, seperti yang terjadi pada Perang Jawa pada abad ke-19. Namun, ketidaksetaraan kekuatan dan teknologi antara pasukan kerajaan lokal dengan pasukan Belanda membuat perlawanan tersebut sulit untuk berhasil. Seiring berjalannya waktu, banyak kerajaan Islam di Indonesia yang terpaksa tunduk di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sistem pemerintahan tradisional diubah, dan otonomi lokal berkurang secara signifikan. Para pemimpin kerajaan sering kali diangkat atau dihapus oleh pihak Belanda sesuai dengan kepentingan kolonial mereka(Armia, 2013). Dengan demikian, kedatangan Belanda di Indonesia tidak hanya mengubah tata kelola politik, tetapi juga memengaruhi keseimbangan kekuasaan, ekonomi, dan sosial di antara kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Hal ini merupakan awal dari periode kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung hingga pertengahan abad ke-20, sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945.

Kerajaan Islam di Sumatera

Pada saat Belanda datang ke Sumatera, terdapat kerajaan-kerajaan Islam yang memiliki situasi dan kondisi yang cukup kompleks. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, kawasan Selat Malaka menjadi medan persaingan antara Aceh, Portugis, dan Johor. Di abad ke-16, Aceh menjadi lebih dominan di kawasan tersebut. Para pedagang Muslim menghindari Malaka yang dikuasai Portugis dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit alternatif. Keputusan ini menguatkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan yang strategis. Aceh, yang pada saat itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang kuat, berusaha aktif menarik perdagangan internasional dan antarkepulauan Nusantara. Fokus Aceh terutama pada pengendalian pelabuhan-pelabuhan pengekspor lada, komoditas yang sangat diminati dan banyak diminuminta di pasar internasional. Upaya ini menandai kebijakan ekonomi yang proaktif dari pemerintah Aceh untuk memperluas wilayah pengaruhnya dalam perdagangan rempah-rempah.

Meskipun Aceh berhasil membangun kekuasaannya sebagai pusat perdagangan, kedatangan Belanda membawa dampak signifikan. Belanda, dengan tujuan menguasai perdagangan dan sumber daya alam di wilayah tersebut, mulai berkompetisi dengan Aceh. Konflik antara Aceh dan Belanda akhirnya meletus dalam serangkaian pertempuran, termasuk Perang Aceh yang berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pertempuran ini, bersama dengan strategi politik dan militer Belanda, menyebabkan keruntuhan kekuasaan Aceh di Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, termasuk Aceh, akhirnya harus berhadapan dengan penjajahan Belanda, yang membawa dampak besar terhadap struktur politik dan sosial di wilayah tersebut.

Kerajaan Islam di Aceh

Pada periode tersebut, kerajaan Islam Aceh berada pada puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, Aceh menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur di kawasan Nusantara. Sayangnya, kejayaan ini berakhir dengan wafatnya Sultan Iskandar Muda pada 27 Desember 1636. Setelah kematiannya, Aceh mengalami perubahan kepemimpinan dengan naiknya Sultan Iskandar Tsani. Meskipun Sultan

Iskandar Tsani berhasil mempertahankan kebesaran Aceh, setelah kematiannya pada 15 Februari 1641, Aceh mengalami periode yang cukup unik dengan berturut-turut dipimpin oleh tiga orang wanita selama 59 tahun. Meskipun mereka mampu menjaga kedaulatan Aceh, periode pemerintahan wanita ini menandai awal kemunduran kekuasaan Aceh. Daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Aceh mulai memerdekakan diri, mengakibatkan pecahnya wilayah kekuasaan dan penurunan pengaruh Aceh di Nusantara. Meski Aceh mengalami kemunduran, kerajaan ini berhasil bertahan cukup lama untuk menikmati kedaulatannya tanpa terlalu banyak intervensi kekuasaan asing. Hal ini menjadi kenyataan yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Minangkabau, Jambi, Riau, dan Palembang yang pada masa itu cenderung mengalami tekanan dan campur tangan kekuasaan asing dengan lebih cepat. Meskipun mengalami kemunduran, sejarah Aceh selama periode ini tetap mencerminkan kekuatan dan keberlanjutan sebagian dari warisan budaya Islam di Indonesia.

Kerajaan Islam di Jawa

Ketika Belanda datang ke Jawa, situasi dan kondisi kerajaan Islam mengalami perubahan signifikan. Pusat pemerintahan Islam telah berpindah dari pesisir ke pedalaman, menempuh perjalanan dari Demak ke Pajang, dan kemudian ke Mataram. Perpindahan ini membawa dampak besar terhadap struktur kekuasaan dan ekonomi, seperti (1) kekuasaan dan sistem politik yang didasarkan pada basis agraris, (2) peran daerah pesisir dalam perdagangan dan pelayaran yang mundur, dan (3) pergeseran pusat-pusat perdagangan. Pada tahun 1619, Mataram, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Agung, berhasil menguasai seluruh Jawa Timur. Di bawah pemerintahannya, terjadi kontak bersenjata antara Mataram dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di wilayah Nusantara. Pertempuran dan konflik antara Mataram dan VOC mencerminkan upaya Belanda untuk menguasai sumber daya dan perdagangan di Jawa (Rahmah Muthia, 2018).

Di Jawa Barat, Banten menjadi pusat penting, terutama dalam perdagangan lada. Banten menarik perdagangan lada dari wilayah-wilayah seperti Indrapura, Lampung, dan Palembang. Meskipun produksi lada lokal Banten tidak signifikan, peran pentingnya dalam perdagangan regional membuatnya menjadi simpul perdagangan yang strategis. Sementara itu, perubahan politik di Mataram dan munculnya Makassar sebagai pusat perdagangan mengakibatkan penurunan peran pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur. Perubahan ini juga menciptakan pergeseran dalam jaringan perdagangan dan rute pelayaran dagang di Indonesia. Awalnya, rute perdagangan melibatkan Maluku – Jawa – Selat Malaka, namun, pada akhir abad ke-16, rute ini berubah menjadi Maluku – Makassar – Selat Sunda. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan ekonomi yang memengaruhi kerajaan Islam di Jawa, seiring dengan hadirnya Belanda dan perubahan dalam pola perdagangan regional (Wihardyanto & Rahmi, 2020).

Latar Belakang Kedatangan Belanda, VOC, Hindia Belanda

Latar belakang kedatangan Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), dan pembentukan Hindia Belanda dapat ditarik dari sejarah kolonialisme dan perburuan Eropa di abad ke-16 hingga abad ke-17. Belanda, yang pada awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Spanyol,

memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1581 dan segera memasuki panggung perebutan wilayah jajahan di Asia. Perseroan Amsterdam mengirim armada kapal dagangnya yang pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman ke Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengembangkan perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai di Eropa. Keberhasilan awal ini menyulut minat banyak perseroan lain, yang akhirnya bergabung pada Maret 1602 dan disahkan oleh Staten-General Republik sebagai Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). VOC diberikan hak khusus untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di wilayah antara Tanjung Harapan dan Kepulauan Solomon, termasuk kepulauan Nusantara. Dorongan utama Belanda adalah mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah, terutama di kepulauan Indonesia yang kaya akan rempah seperti cengkih, lada, dan pala (Saefullah, 2016).

VOC, didirikan pada tahun 1602, menjadi alat utama bagi Belanda dalam mengejar keuntungan ekonomi dan dominasi wilayah di Asia. Melalui keberhasilan VOC, Belanda dapat mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur, mengamankan pelabuhan-pelabuhan strategis, dan menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan lokal. VOC diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak untuk memimpin pasukan militer dan membuat perjanjian dengan negara-negara Asia. Kedatangan Belanda ke wilayah ini juga terkait dengan kompetisi antar-negara Eropa untuk menguasai perdagangan dan sumber daya di dunia. Belanda bersaing dengan Spanyol, Inggris, dan Portugal untuk mendominasi jalur perdagangan rempah-rempah. Hindia Belanda, yang terbentuk setelah VOC memperoleh hak-hak monopoli di wilayah Hindia Timur, menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Asia. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga unsur-unsur politik, militer, dan sosial yang mendefinisikan hubungan antara Belanda dan wilayah jajahannya di Hindia Belanda.

Dalam serangkaian pelayaran awal, VOC mencapai Banten, Selat Bali, dan Maluku untuk membeli rempah-rempah. Perjalanan berikutnya melibatkan konflik dengan Portugis di Ambon, pendirian benteng sendiri, dan perjanjian dagang dengan penduduk lokal. Meskipun berhasil membuka perdagangan dengan beberapa wilayah, VOC menghadapi perlawanan dari pedagang-pedagang pribumi yang merasa terancam oleh upaya monopoli yang dilakukan oleh VOC. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan dengan kerugian besar karena sejumlah faktor seperti pembukuan yang tidak jujur, manajemen yang buruk, korupsi, hutang besar, serta praktik monopoli dan tanam paksa (Mahamid, 2023). Sebagai hasilnya, Indonesia secara resmi menjadi bagian dari pemerintahan Belanda pada pergantian abad ke-18, yang berlangsung hingga tahun 1942. Meskipun sempat diinterupsi oleh pemerintahan Inggris pada 1811-1816, pemerintahan Belanda di Indonesia memberlakukan kebijakan yang tidak menguntungkan penduduk setempat, seperti sistem tanam paksa pada tahun 1830 dan politik etis pada tahun 1901. Seluruh periode ini mencerminkan kolonialisme dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda di Hindia Belanda.

Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Indonesia merupakan bagian integral dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Periode ini melibatkan berbagai bentuk

perlawanan, mulai dari perlawanan bersenjata hingga perlawanan non-kooperatif dan perjuangan politik.

Berikut adalah beberapa aspek perlawanan terhadap penjajahan Belanda:

1. Perlawanan Bersenjata

- Perang Diponegoro (1825-1830): Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, perang ini merupakan salah satu perlawanan besar pertama terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro memimpin gerakan melawan penindasan dan penguasaan Belanda, yang pada akhirnya berujung pada kekalahan dan penangkapannya.
- Perang Aceh (1873-1904): Kerajaan Aceh di Sumatera Utara menghadapi serangkaian konflik dengan Belanda. Meskipun Aceh berhasil mempertahankan kemerdekaannya untuk sementara waktu, konflik berlarut-larut dan berakhir dengan penaklukan Aceh oleh Belanda pada awal abad ke-20.

2. Perlawanan Rakyat dan Politik

- Sarekat Islam (1912): Organisasi ini awalnya didirikan sebagai serikat pekerja, tetapi kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang menentang penjajahan Belanda. Sarekat Islam menyuarakan aspirasi kemerdekaan dan hak-hak politik bagi rakyat Indonesia (Kistanto, 2018).
- Perlawanan di Bali (1906-1908): Rakyat Bali memberikan perlawanan terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama terkait dengan sistem tanam paksa dan reformasi agraria.

3. Perlawanan Kultural dan Pendidikan

- Kebangkitan Nasional: Pada awal abad ke-20, muncul kebangkitan nasional di kalangan intelektual Indonesia. Budi Utomo, organisasi pendidikan yang didirikan pada 1908, dan Boedi Oetomo menjadi katalisator untuk kesadaran nasional dan perlawanan terhadap penjajahan.
- Pendidikan Nasional: Institusi pendidikan menjadi tempat penting untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Banyak pemimpin nasionalis Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta, menerima pendidikan di Eropa dan kembali ke Indonesia dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip kemerdekaan dan perlawanan.

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi tersebut diikuti oleh perang kemerdekaan yang berlangsung hingga 1949 dan berakhir dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Perlawanan ini menandai akhir dari era penjajahan dan awal dari perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.

Politik Islam Hindia Belanda

Politik Islam di Hindia Belanda pada masa kolonial mencakup berbagai gerakan dan organisasi yang berupaya mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Islam di tengah penjajahan Belanda. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejumlah perkembangan politik dan sosial mempengaruhi dinamika politik Islam di Hindia Belanda. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam politik Islam Hindia Belanda:

1) Reformasi Islam

Gerakan reformis Islam, seperti gerakan Tarekat Naqsyabandiyah dan gerakan Wahabi, memiliki dampak signifikan di Hindia Belanda. Gerakan ini bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik lokal yang dianggap bid'ah (inovasi) dan kembali ke akar-akar Islam yang murni (Jamaruddin, 2016).

2) Pendidikan dan Kebangkitan Intelektual

Sekolah-sekolah agama dan pesantren menjadi pusat penting dalam menyebarkan pemikiran reformis. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim berperan dalam membangkitkan semangat intelektual dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam.

3) Organisasi Islam

Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, didirikan pada 1912 oleh Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama (NU), didirikan pada 1926 oleh Hasyim Asy'ari, memiliki peran besar dalam politik Islam. Muhammadiyah menekankan pada modernisasi dan reformasi, sementara NU cenderung lebih konservatif.

4) Gerakan Sosial dan Kemanusiaan

Gerakan-gerakan Islam juga aktif dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Muhammadiyah, misalnya, terlibat dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencerminkan peran Islam dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

5) Pertentangan dengan Kolonial Belanda

Beberapa kelompok Islam terlibat dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun sebagian besar gerakan Islam lebih fokus pada pembaruan internal dan pengembangan masyarakat Muslim, beberapa tokoh dan organisasi terlibat dalam perlawanan terhadap penindasan kolonial.

6) Pemikiran Politik Islam

Pemikiran politik Islam semakin berkembang, dan sejumlah ulama terlibat dalam menyusun pandangan politik Islam. Mereka menyuarakan prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi politik umat Islam, dan perlindungan hak-hak Muslim (Tumpal Sianipar, 2020). Perkembangan politik Islam di Hindia Belanda telah membentuk landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejumlah tokoh dan organisasi Islam memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang merdeka, adil, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

KESIMPULAN

Kedatangan Belanda ke Indonesia pada abad ke-17 memberikan dampak yang signifikan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Jawa, dan Aceh. Penjajahan tersebut mengubah tata kelola politik, ekonomi, dan sosial di seluruh kepulauan. Kerajaan-kerajaan Islam menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan militer yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan otonomi lokal. Meskipun beberapa kerajaan mencoba melawan dominasi Belanda, ketidaksetaraan kekuatan dan teknologi membuat perlawanan sulit untuk berhasil. Dengan demikian, Belanda secara bertahap mengukuhkan kekuasaannya dan mengubah lanskap politik di wilayah tersebut.

Di Sumatera, Aceh, meskipun mencapai kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, mengalami penurunan kekuasaan setelah kematiannya. Kedatangan Belanda menciptakan konflik yang berlarut-larut, mengakhiri kemerdekaan Aceh, dan membawa dampak signifikan pada struktur politik dan sosial di Sumatera. Di Jawa, perpindahan pusat pemerintahan Islam dari pesisir ke pedalaman mengakibatkan perubahan dalam kekuasaan agraris, perdagangan, dan pusat-pusat perdagangan. Belanda secara aktif berkompetisi dengan kerajaan lokal, terutama Mataram, untuk menguasai sumber daya dan perdagangan di pulau tersebut. Pergeseran rute perdagangan mencerminkan dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, M. S. (2013). Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach. *Jurnal Justisia*, 53(9), 1–16.
- Jamaruddin, A. (2016). Komunikasi umat Beragama. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(1), 170–187.
- Khaeruddin, K. (2022). Dinamika Politik Kerajaan – Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII). *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(2), 111–124. <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.1325>
- Kistanto, N. H. (2018). Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2), 169. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>
- Mahamid, M. N. L. (2023). Urgensi Keberadaan Kota-Kota Pesisir Terhadap Kajian Sejarah Maritim Di Nusantara: Sebuah Studi Strukturalisme. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(2), 195–212. <https://doi.org/10.33652/handep.v6i2.373>
- Rahmah Muthia, 2018. (2018). *ISLAMISASI DI INDONESIA*. 1–26.
- Saefullah, A. (2016). Tumasik: Sejarah Awal Islam di Singapura (1200-1511 M). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 14(2), 419. <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.507>
- Surbakti, K. (2015). TINGGALAN BATU LUMPANG DI DESA RUKO, KECAMATAN TOBELO: Tinjauan atas Konteks Sejarah dan Sosial Budaya Kerajaan-Kerajaan Lokal di Halmahera Utara Remains. *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.
- Tumpal Sianipar, H. M. (2020). The Islamization of Bugis Kingdoms By Gowa-Tallo Kingdom Through Musu Selleng on 16 Th Century. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, 5(4), 264–275.
- Wihardyanto, D., & Rahmi, D. H. (2020). Pengaruh Kolonialisasi Belanda Di Kawasan Pusat Kota Pulau Jawa : Sebuah Kajian Literatur. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.24252/nature.v7i1a2>
- Yahya, I., Putri, L. A., Hidayat, M. Z., Riadi, M. A., Agung, M. A. A., Gusmawarni, M., & Domo, A. A. (2023). Kiprah Kerajaan Islam Dalam Penyebaran Islam di Indonesia. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 2(1), 33–41.